KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
IDENTITAC DENEDINA DENOMACII					

CXQAI2PG

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 5 8 1			H.4 X	H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			Н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 563 9 722 0000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : SUDARMADI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
4 21-402-01	2.500.000	2.500.000	0	5	125.000		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokum	en Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0				
C.2 Nama Instansi Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	TIMUR		
C.3 ID Subunit Organisasi :		ПППП			<del></del>		
C.4 Tanggal :	2 6 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY						
2.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
	Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperli	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa d	okumen ini tela	ah ditandatangani secara		